

Peran Indonesia dalam Penanganan Konflik Israel dan Hamas: Suara Kemanusiaan di Tingkat Global

Ahsin Haris Ulinnuha

Program Studi Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: nuhapratama02@gmail.com

Kata Kunci:

Peran hukum, alat kontrol masyarakat

Keywords:

The Role of Law, a Tool for Social Control

ABSTRAK

Sebagai negara mayoritas Muslim yang terkemuka, Indonesia secara historis menunjukkan solidaritas yang kuat terhadap perjuangan Palestina, memperjuangkan hak-hak kemanusiaan di tengah kekerasan yang terus berlangsung. Konflik ini telah menyebabkan krisis kemanusiaan yang signifikan, ditandai dengan kehilangan nyawa, pengungsian, dan kekurangan parah kebutuhan dasar bagi warga sipil. Masyarakat sipil Indonesia, termasuk LSM, memainkan peran penting dalam meningkatkan kesadaran dan memberikan bantuan kepada populasi yang terdampak. Keterlibatan ini mencerminkan komitmen Indonesia untuk mempromosikan

perdamaian dan keadilan di panggung internasional. Studi ini menekankan pentingnya respons kemanusiaan dan upaya diplomatik dalam menghadapi tantangan kompleks yang ditimbulkan oleh konflik Israel-Palestina, serta menyoroti posisi dan pengaruh unik Indonesia dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan bantuan kemanusiaan.

ABSTRACT

As a prominent Muslim-majority nation, Indonesia has historically shown strong solidarity with the Palestinian cause, advocating for humanitarian rights amidst ongoing violence. The conflict has led to significant humanitarian crises, characterized by loss of life, displacement, and severe shortages of basic necessities for civilians. Indonesian civil society, including NGOs, plays a crucial role in raising awareness and providing aid to affected populations. This engagement reflects Indonesia's commitment to promoting peace and justice on the international stage. The study underscores the importance of humanitarian responses and diplomatic efforts in addressing the complex challenges posed by the Israel-Palestine conflict, highlighting Indonesia's unique position and influence in advocating for human rights and humanitarian assistance.

Pendahuluan

Peran Indonesia

Indonesia telah memainkan peran yang signifikan dalam penanganan konflik antara Israel dan Hamas dengan mengadvokasi perdamaian dan kemanusiaan di tingkat global. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia secara konsisten menegaskan dukungannya terhadap hak-hak Palestina dan mengecam kekerasan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga sipil, termasuk serangan terhadap Gaza. Dalam forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Hamas tidak hanya mengedepankan kepentingan politik, tetapi juga mengartikulasikan suara kemanusiaan yang berlandaskan pada prinsip-prinsip moral dan keadilan internasional. Dengan demikian, Indonesia memperjuangkan perdamaian yang berkelanjutan dan keadilan bagi rakyat Palestina,



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

serta mempromosikan dialog antarbangsa sebagai langkah menuju solusi yang damai dan berkelanjutan bagi konflik tersebut.

Indonesia telah menunjukkan komitmen yang teguh dalam mendukung perjuangan kemerdekaan Palestina sebagai bagian dari prinsip kemanusiaan dan keadilan. Sejak lama, Indonesia menolak segala bentuk penjajahan, termasuk terhadap rakyat Palestina yang masih berjuang untuk hak-hak mereka sebagai bangsa yang merdeka dan berdaulat. Sikap ini telah terlihat sejak tahun 1955, ketika Indonesia dengan tegas menolak kehadiran Israel dalam Konferensi Asia-Afrika di Bandung, sebuah pertemuan bersejarah yang menegaskan solidaritas antarnegara yang pernah mengalami kolonialisme. Seiring berjalannya waktu, komitmen Indonesia terhadap Palestina tidak berubah, bahkan di era reformasi hingga saat ini. Indonesia tetap konsisten dalam mendukung hak-hak Palestina di berbagai forum internasional dan secara resmi tidak menjalin hubungan diplomatik dengan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap perjuangan rakyat Palestina. Di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, dukungan ini semakin ditegaskan melalui berbagai langkah diplomasi yang aktif dan berkelanjutan. Indonesia secara konsisten menyuarakan isu kemerdekaan Palestina dalam berbagai pertemuan dunia, agar komunitas internasional memberikan perhatian dan dukungan nyata bagi penyelesaian konflik yang telah berlangsung begitu lama.

Menteri Luar Negeri Indonesia, Retno Marsudi, juga memainkan peran penting dalam diplomasi kemanusiaan ini. Dalam pertemuan tingkat menteri Komite Palestina dari negara-negara Gerakan Non-Blok (GNB), ia mengajak seluruh anggota GNB untuk bersatu dalam mendukung proses kemerdekaan Palestina. Upaya ini tidak hanya mencerminkan kepedulian Indonesia terhadap rakyat Palestina, tetapi juga menjadi bagian dari nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh bangsa Indonesia. Dengan konsistensi dan solidaritas ini, Indonesia terus berupaya menjadi suara bagi mereka yang tertindas dan memperjuangkan dunia yang lebih adil bagi semua.

Konflik antara Israel dan Hamas

Konflik antara Israel dan Hamas telah menjadi sorotan utama dalam politik global dan kemanusiaan. Dalam kerangka ini, peran Indonesia dalam menangani konflik tersebut telah menjadi subjek perhatian yang signifikan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki pengaruh dan tanggung jawab untuk memperjuangkan perdamaian dan kemanusiaan dalam konflik tersebut. Dalam beberapa tahun terakhir, Indonesia telah secara konsisten menegaskan dukungannya terhadap hak-hak Palestina dan mengecam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Israel terhadap warga sipil, terutama di wilayah Gaza. Peran Indonesia tidak hanya terbatas pada retorika politik, tetapi juga meliputi upaya diplomasi aktif di forum-forum internasional seperti Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI). Pada tingkat domestik, sikap Indonesia terhadap konflik Israel dan Hamas mencerminkan kepedulian akan isu kemanusiaan dan keadilan internasional. Dengan demikian, peran Indonesia dalam penanganan konflik tersebut memperjuangkan suara kemanusiaan yang kuat di tingkat global, menekankan pentingnya perdamaian yang berkelanjutan dan solusi politik yang adil bagi kedua belah pihak.

Fungsi Hukum Dalam Kontrol Sosial

Konflik antara Israel dan Hamas telah menjadi salah satu isu yang paling rumit dan dipenuhi dengan konsekuensi tragis di wilayah Timur Tengah. Di tengah ketegangan ini, banyak negara dan lembaga internasional berusaha memediasi, memberikan bantuan, dan menyuarakan solusi damai. Salah satu negara yang secara konsisten memperjuangkan perdamaian dan keadilan adalah Indonesia. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia dan tradisi diplomasi yang kuat, Indonesia telah berperan penting dalam upaya penyelesaian konflik Israel-Palestina, termasuk konflik antara Israel dan Hamas.

Indonesia telah secara aktif terlibat dalam upaya diplomasi untuk mendorong perdamaian antara Israel dan Palestina. Sebagai anggota Gerakan Non-Blok dan Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Indonesia memiliki platform yang kuat untuk menyuarakan kepentingan dan aspirasi bangsa-bangsa Muslim di dunia, termasuk dalam isu konflik Israel-Palestina. Selama bertahun-tahun, Indonesia telah memberikan bantuan kemanusiaan kepada rakyat Palestina yang terkena dampak konflik, termasuk bantuan medis, pangan, dan perlengkapan lainnya. Bantuan ini bertujuan untuk membantu meringankan penderitaan yang dialami oleh warga Palestina yang terjebak di tengah konflik. Indonesia secara konsisten mendukung solusi dua negara sebagai cara untuk mengakhiri konflik Israel-Palestina. Solusi ini melibatkan pembentukan negara Palestina yang merdeka dan berdaulat di samping Israel, dengan batas yang diakui secara internasional. Indonesia telah menggunakan posisinya di forum internasional untuk mendorong pihak-pihak terkait untuk bekerja menuju solusi yang adil dan berkelanjutan. Indonesia juga telah mengutuk keras tindakan kekerasan dan tindakan provokatif yang dilakukan oleh kedua belah pihak dalam konflik tersebut. Negara ini secara tegas mengecam serangan terhadap warga sipil, termasuk serangan udara oleh Israel dan serangan roket oleh Hamas, serta tindakan pelanggaran hak asasi manusia lainnya.

Sebagai anggota Dewan Keamanan PBB pada periode 2019-2020, Indonesia memiliki platform yang kuat untuk membawa isu konflik Israel-Palestina ke forum internasional. Negara ini telah menggunakan keanggotaannya untuk mendorong dialog, negosiasi, dan langkah-langkah konkret untuk mencapai perdamaian yang berkelanjutan di kawasan tersebut. Meskipun Indonesia memiliki keterbatasan dalam mempengaruhi langsung dinamika konflik antara Israel dan Hamas, negara ini terus berperan sebagai suara kemanusiaan yang penting di tingkat global. Dengan terus mendukung perdamaian, mengadvokasi hak-hak rakyat Palestina, dan mengecam kekerasan, Indonesia berusaha untuk menjadi bagian dari solusi dalam penyelesaian konflik yang telah berlangsung selama puluhan tahun ini. Peran Indonesia dalam penanganan konflik Israel dan Hamas menyoroti komitmen negara ini terhadap perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan di panggung dunia. Dalam menghadapi kompleksitas dan kekerasan konflik tersebut, Indonesia terus menunjukkan bahwa solusi damai adalah satu-satunya jalan yang memungkinkan untuk mencapai stabilitas dan keamanan jangka panjang di Timur Tengah.

Peran Indonesia dalam penanganan konflik Israel dan Hamas dapat disimpulkan sebagai sebuah upaya yang menonjolkan suara kemanusiaan di tingkat global. Melalui diplomasi aktif, bantuan kemanusiaan, dukungan terhadap solusi dua negara, pengutukan terhadap kekerasan, dan peran dalam forum internasional, Indonesia telah secara konsisten berusaha untuk mendorong perdamaian, keadilan, dan penyelesaian yang adil dalam konflik yang kompleks ini. Dalam konflik yang telah berlangsung puluhan tahun ini, Indonesia telah memainkan peran penting dalam menyoroti perlunya mengakhiri kekerasan dan menderita yang dialami oleh rakyat Palestina serta mendukung proses perdamaian yang berkelanjutan di Timur Tengah. Melalui suaranya di forum internasional dan tindakan nyata yang konsisten, Indonesia menegaskan bahwa solusi damai adalah satu-satunya jalan yang memungkinkan untuk mencapai stabilitas dan keamanan jangka panjang di wilayah tersebut. Sebagai negara dengan tradisi pluralisme dan keragaman, Indonesia terus menjadi contoh bagi negara-negara lain dalam upaya menyelesaikan konflik melalui dialog, kerjasama, dan komitmen terhadap nilai-nilai kemanusiaan.

Sejarah Hamas

Hukum Hamas didirikan pada 14 Desember 1987 dan telah menjadi salah satu faksi yang paling dinamis serta efektif dalam kancah politik dan militer Palestina. Organisasi ini merupakan sayap dan perpanjangan dari gerakan Ikhwanul Muslimin. Piagamnya menyatakan bahwa Hamas menjadikan Islam sebagai landasan utama dalam gagasan, konsep, dan persepsi mereka. Islam menjadi pedoman dalam menentukan arah perjuangan serta mencari solusi dalam setiap tantangan yang dihadapi. Selain itu, Hamas memiliki tujuan utama untuk membebaskan tanah Palestina, mendirikan negara Islam di wilayah tersebut, serta menyerukan pendidikan universal bagi generasi mendatang guna mewujudkan cita-cita tersebut.

Salah satu tokoh utama dalam Hamas adalah Shaykh al-Intifada Ahmad Yasin. Untuk wilayah Gaza, pemimpin-pemimpin Hamas meliputi 'Abd al-'Azîz al-Rantisi, Mahmûd al-Zahad, dan 'Abd al-Fatâh Dukhân, sedangkan di wilayah Tepi Barat, terdapat Jamal Saîm, Hasan Yûsuf, dan Jamal Natasyah. Di luar Palestina, Khalid Mish'al memimpin biro politik organisasi ini. Dengan kepemimpinan seperti ini, Hamas terus berupaya untuk berperang dan menciptakan generasi penerus yang diharapkan dapat mewujudkan negara Palestina. Namun, dalam perjalanannya, Hamas juga dianggap sebagai pihak yang mengganggu stabilitas entitas Zionis Yahudi, meskipun sebelumnya telah ada kesepakatan antara Israel dan Organisasi Pembebasan Palestina (PLO) sejak 1994 untuk mendirikan pemerintahan otonom bagi Palestina di Gaza dan Tepi Barat.

Konflik antara Hamas dan Israel terus berlangsung dengan berbagai insiden kekerasan yang terjadi. Salah satu peristiwa besar yang melibatkan Hamas terjadi pada Februari-Maret 1996, ketika kelompok ini bertanggung jawab atas serangan yang menewaskan 70 warga Israel dan melukai 340 lainnya. Meskipun demikian, OPP/PLO justru bekerja sama dengan Israel dan sekutu-sekutunya, termasuk Amerika Serikat, untuk menekan serta menyerang Hamas. Beberapa pemimpin Hamas, seperti Khalid

Mish'al, bahkan menjadi sasaran upaya pembunuhan dan penangkapan oleh Amerika Serikat.

Saat ini, Palestina menghadapi situasi yang semakin sulit dalam menghadapi Israel. Di sisi lain, perhatian dan bantuan dari negara-negara Islam semakin berkurang karena kelemahan dan perpecahan internal di antara mereka. Negara-negara seperti Mesir, Suriah, Irak, dan Yaman mengalami konflik internal yang membuat mereka tidak mampu memberikan dukungan penuh kepada Palestina. Sementara itu, Israel semakin kuat dalam aspek ekonomi, persenjataan, serta dukungan politik dari negara-negara besar seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Prancis. Migrasi besar-besaran orang-orang Yahudi ke Israel juga terus meningkat. Pada tahun 1948, ketika negara Israel didirikan, populasi Yahudi hanya sekitar 650.000 jiwa, namun pada tahun 2000, jumlahnya telah meningkat drastis menjadi 4.947.000 jiwa.

Jika rancangan undang-undang Yahudi yang diajukan oleh Perdana Menteri Benjamin Netanyahu disahkan oleh Parlemen Israel, maka jumlah imigran Yahudi diperkirakan akan bertambah lebih besar daripada sebelumnya. Undang-undang tersebut dapat mendorong gelombang migrasi besar-besaran orang-orang Yahudi dari berbagai negara di Eropa dan Amerika ke Israel. Salah satu konsekuensi dari undang-undang baru tersebut adalah bahwa hanya orang Yahudi yang boleh menjadi warga negara Israel, sementara warga Muslim Arab yang saat ini memiliki kewarganegaraan Israel, meskipun jumlahnya lebih dari dua juta orang atau sekitar seperempat dari populasi Israel, diprediksi akan kehilangan hak kewarganegaraannya. Jika ini terjadi, nama Negara Israel pun dapat berubah secara resmi menjadi "Negara Yahudi."

Undang-undang ini ditujukan bagi komunitas Muslim Arab sebagai kelompok minoritas yang dianggap menjadi ancaman bagi eksistensi Israel. Jika kebijakan ini diberlakukan, bukan tidak mungkin warga Muslim Arab di Israel akan mengalami pengusiran massal. Pemerintahan Benjamin Netanyahu telah mendapatkan persetujuan kabinet untuk undang-undang ini, yang semakin memperkuat identitas Yudaisme sebagai bangsa dan agama dengan solidaritas yang lebih besar di kancah internasional. Konsep Yudaisme dalam undang-undang ini lebih luas daripada sekadar Israel atau bahasa Ibrani, karena istilah Yahudi tidak hanya merujuk pada etnis Ibrani, tetapi juga mencakup mereka yang beragama Yahudi dari berbagai latar belakang.

Seiring dengan perkembangan ini, jika undang-undang Israel tersebut disahkan, kondisi umat Muslim, khususnya Palestina, diprediksi akan semakin memburuk. Selain karena mereka masih terpecah ke dalam berbagai kelompok dan faksi, mereka juga akan menghadapi tantangan baru berupa gelombang eksodus dan deportasi warga Muslim yang sebelumnya memiliki kewarganegaraan Israel. Semua ini diperkirakan akan terjadi dalam waktu dekat, memperburuk situasi yang sudah sulit bagi rakyat Palestina dan menguji solidaritas dunia Islam dalam menghadapi kebijakan yang semakin menekan hak-hak mereka.

Kesimpulan dan Saran

Indonesia telah memainkan peran penting dalam penanganan konflik antara Israel dan Hamas dengan menekankan pendekatan diplomasi dan kemanusiaan. Sebagai negara dengan populasi Muslim terbesar, Indonesia secara konsisten mendukung hak-hak Palestina dan mengecam tindakan kekerasan terhadap warga sipil. Di berbagai forum internasional seperti PBB dan OKI, Indonesia terus mengadvokasi solusi damai, termasuk mendukung solusi dua negara. Dengan konsistensi ini, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap perdamaian, keadilan, dan kemanusiaan dalam menyelesaikan konflik yang telah berlangsung puluhan tahun. Indonesia perlu meningkatkan peranannya dalam diplomasi internasional dengan memperkuat kerja sama dengan negara-negara lain untuk menekan Israel agar menghormati hukum internasional dan hak asasi manusia. Selain itu, Indonesia dapat mengembangkan inisiatif baru dalam pemberian bantuan kemanusiaan bagi warga Palestina serta mendukung upaya rekonsiliasi antar faksi di Palestina. Dengan mengoptimalkan peranannya di organisasi internasional, Indonesia dapat semakin efektif dalam mendorong penyelesaian konflik yang adil dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- A'yun, Shofaa Qurrota, et al. 2024. "Indonesia's Diplomatic Actions in the Israel-Palestine Conflict." *Jurnal Pertahanan: Media Informasi tentang Kajian dan Strategi Pertahanan yang Mengedepankan Identity, Nasionalism dan Integrity* 10.2: 329-341.
- Billah, Baedt Giri Mukhoddam, Moh Junaidi Mohtar Hakim, and Uril Bahrudin. 2023. "Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab-Israel dan Dampaknya Terhadap Palestina." *Jurnal ICMES* 7.1: 62-81.
- Indriasandi, Ihwanarotama Bella, and Wildana Wargadinata. 2023. "Palestine-Israel Conflict Resolution Analysis Study in the Perspective of Islamic History." *Jurnal al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 8.2: 102-112.
- Jamaan, Ahmad, and Saibatul Aslamiah. *Diplomasi Indonesia dalam Mendukung Palestina Menjadi Negara Peninjau di Pbb Tahun 2012*. Diss. Riau University, 2015.
- Karso, A. Junaedi. 2024. "Perang Israel Palestina Peran serta Indonesia dalam Mewujudkan Kemerdekaan Palestina: Kontribusi Bantuan Kemanusiaan Muhammadiyah (Aksi Bela Palestina Public Figure Internasional & Nasional)." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 26.1.
- Kaslam, Kaslam. 2024. "Solidaritas Global: Gerakan Kemanusiaan untuk Palestina di Indonesia." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 26.1.
- Mardenis, Mardenis. 2012. "Revitalisasi Peran Organisasi Konferensi Islam (OKI) untuk Mewujudkan Negara Palestina Merdeka." *Masalah-Masalah Hukum* 41.2: 237-247.
- Masyrofah, S. Ag. 2023. *Politik Luar Negeri Indonesia Era Reformasi: Upaya Penyelesaian Konflik Israel-Palestina*. Deepublish.
- SUSAN, Gustina. 2012. *Peranandewan Keamanan Pbb Dalam penyelesaian Konflik IsraelPalestina (Studi Kasus Resolusi Dewan Keamanan Pbb Nomor 1860 Tahun 2009)*. Diss. Universitas Andalas.